

LAPORAN KEUANGAN INDEPENDENT
DAN
LAPORAN KEUANGAN
PT JAMKRIDA JABAR
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2014

2014



Husni, Mucharam & Rasidi
Registered Public Accountants



PT. JAMKRIDA JABAR
SOLUSI KUMKM MASYARAKAT JAWA BARAT



PT. JAMKRIDA JABAR

Jl. Kopo No. 54 (Bank BJB, KCP Kopo Lt. 3)
Panjuran - Bandung
Telp : (62-22) 6128296, 6075134, 6078282
Fax : (62-22) 6128266
e-mail : info@jamkrida-jabar.co.id
website : www.jamkrida-jabar.co.id

**SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
PT. JAMKRIDA JABAR**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : Tri Budhi Muljawan
- Jabatan : Direktur Utama
- Alamat Kantor : Jl Kopo No. 54 Panjuran Bandung

- Nama : Budi Setyono
- Jabatan : Direktur Keuangan
- Alamat Kantor : Jl Kopo No. 54 Panjuran Bandung

Menyatakan bahwa:

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perseroan Terbatas Jamkrida Jabar;
2. Laporan Keuangan Perseroan Terbatas Jamkrida Jabar telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. Semua informasi dalam laporan Keuangan Perseroan Terbatas Jamkrida Jabar telah dimuat secara lengkap dan benar;
4. Laporan Keuangan Perseroan Terbatas Jamkrida Jabar tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
5. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perseroan Terbatas Jamkrida Jabar.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi/


Tri Budhi Muljawan
Direktur Utama


Budi Setyono
Direktur Keuangan



Bandung, 26 Februari 2015



Husni, Mucharam & Rasidi
Registered Public Accountants

Nomor: LAI/GA/HA/15006

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Jamkrida Jabar**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Jamkrida Jabar yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2014, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

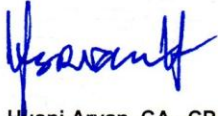
Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Jamkrida Jabar tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas, untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Kantor Akuntan Publik
Husni, Mucharam & Rasidi



Drs. Husni Arvan, CA., CPA.

Izin Praktik : No. AP.0071

Izin KAP : No. KEP-662/KM.17/1998

26 Februari 2015

PT JAMKRIDA JABAR

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN DIREKSI

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

LAPORAN KEUANGAN

	<u>Halaman</u>
Laporan Posisi Keuangan 31 Desember 2014 dan 2013	1
Laporan Laba Rugi Komprehensif untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	2
Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	3
Laporan Arus Kas untuk Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	4
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun-Tahun yang Berakhir 31 Desember 2014 dan 2013	
Gambaran Umum Perusahaan	5-6
Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan	6-15
Catatan Atas Laporan Keuangan	15-28

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

	Catatan	31 Desember 2014	31 Desember 2013
ASET			
Kas dan Setara Kas	3	99.818.053.661	95.204.135.376
Aset Keuangan yang Dimiliki Hingga Jatuh Temp	2g, 4	-	4.000.000.000
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	5	333.679.599	215.760.057
Beban dibayar dimuka	2i, 6	5.182.150.938	1.118.104.999
Aset Tetap			
Setelah dikurangi akumulasi penyusutan berturut-turut sebesar Rp509.036.641 dan Rp260.638.916 per 31 Desember 2014 dan 2013	2j, 7	1.071.771.980	1.192.518.325
Aset Pajak Tangguhan	2p, 15c	2.735.524.009	1.587.681.276
Aset Lain-lain	2k, 8	7.437.826.998	338.751.640
JUMLAH ASET		116.579.007.186	103.656.951.674
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Hutang Pajak	2p, 15a	19.826.153	64.736.560
Hutang Regaransi	9	233.583.481	110.662.822
Beban Yang Masih Harus Dibayar	10	261.465.595	105.758.136
Penampungan Sementara IJP	11	1.453.938.256	328.968.870
Hutang Lancar Lainnya	12	246.435.696	248.551.164
Pendapatan Diterima Dimuka	13	10.764.123.214	2.739.362.409
Cadangan Klaim	2s, 14	901.401.723	223.705.274
Liabilitas Jangka Panjang	2o, 16	83.105.511	300.807.543
JUMLAH LIABILITAS		13.963.879.629	4.122.552.778
EKUITAS			
Modal Saham	17	100.200.000.000	100.200.000.000
<i>Modal dasar 30.000 lembar saham, ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 10.020 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000.000 per lembar saham.</i>			
Saldo Rugi Tahun Lalu	17	(665.601.104)	(557.243.519)
Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan	17	3.080.728.661	(108.357.585)
JUMLAH EKUITAS		102.615.127.557	99.534.398.896
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		116.579.007.186	103.656.951.674

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
PENDAPATAN PENJAMINAN			
Imbal Jasa Penjaminan	2q, 2m, 18	6.300.164.188	1.349.595.129
Beban Fee Based Income Bank	2q, 2m, 18	(20.498.694)	(4.384.233)
Beban Komisi Agen	2q, 2m, 18	(732.507.308)	(106.807.695)
Restitusi IJP	18	(53.179.740)	-
Manajemen Fee	18	191.644.192	24.647.040
Jumlah Imbal Jasa Penjaminan		5.685.622.638	1.263.050.241
BEBAN KLAIM			
Beban Klaim	2m, 20	(913.359.561)	(2.896.645)
Beban Cadangan Klaim	2s, 20	(677.696.449)	(223.705.274)
Beban Regaransi	2m, 20	(1.999.441.553)	(411.899.696)
Jumlah Beban Klaim		(3.590.497.563)	(638.501.615)
PENDAPATAN USAHA - BERSIH		2.095.125.075	624.548.626
PENDAPATAN INVESTASI	2m, 19	9.788.727.309	5.108.318.478
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	2m, 22	67.588.045	37.330.273
BEBAN USAHA			
Beban Operasional	2m, 21	(823.144.129)	(788.073.825)
Beban Sumber Daya Manusia	2m, 21	(5.814.618.121)	(4.426.047.465)
Beban Administrasi dan Umum	2m, 21	(1.414.672.147)	(1.031.477.447)
Jumlah Beban Usaha		(8.052.434.397)	(6.245.598.737)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		3.899.006.032	(475.401.360)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
Beban Pajak Kini	2p, 15b	(1.966.120.104)	(1.029.129.751)
Manfaat Pajak tangguhan	2p, 15c	1.147.842.733	1.396.173.526
Jumlah Beban Pajak Penghasilan		(818.277.371)	367.043.775
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN		3.080.728.661	(108.357.585)
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA			
Pendapatan Komprehensif Lainnya		-	-
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		3.080.728.661	(108.357.585)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014 DAN 2013

(Disajikan dalam Rupiah penuh)

	Catatan	Modal Saham	Ditentukan Penggunaannya		Saldo Laba	Komponen Ekuitas Lainnya	Saldo Ekuitas
			Cadangan Tujuan	Cadangan Umum			
Saldo pada tanggal 1 Januari 2013	17	25.200.000.000	-	-	-	-	25.200.000.000
Setoran Modal	17	75.000.000.000	-	-	-	-	75.000.000.000
Saldo Laba Tahun Berjalan		-	-	-	(665.601.104)	-	(665.601.104)
Saldo per 31 Desember 2013		100.200.000.000	-	-	(665.601.104)	-	99.534.398.896
Saldo Laba Tahun Berjalan	17	-	-	-	3.080.728.661	-	3.080.728.661
Saldo per 31 Desember 2014		100.200.000.000	-	-	2.415.127.557	-	102.615.127.557

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Disajikan dalam Rupiah penuh)

	<u>Catatan</u>	<u>31 Desember 2014</u>	<u>31 Desember 2013</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari Penjaminan		13.710.383.443	4.007.612.389
Pembayaran Klaim		(2.789.880.455)	(304.133.519)
Pembayaran kepada Karyawan dan Pemasok		(6.597.241.460)	(12.140.838.412)
Pembayaran Pajak Penghasilan		(2.012.859.270)	(1.235.412.812)
Pendapatan dari Investasi	5, 19	9.670.807.767	5.108.318.478
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI		11.981.210.025	(4.564.453.876)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Pengadaan Aset Tetap	2j, 7	(127.866.740)	(411.633.241)
Aset Dalam Penyelesaian	2k, 8	(7.239.425.000)	-
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI		(7.367.291.740)	(411.633.241)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Kenaikan Modal Disetor	17	-	75.000.000.000
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN		-	75.000.000.000
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		4.613.918.285	70.023.912.883
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		95.204.135.376	25.180.222.493
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		99.818.053.661	95.204.135.376

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

PT JAMKRIDA JABAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2014 DAN 2013
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh)

1. INFORMASI UMUM

PT JAMKRIDA JABAR (Perusahaan) dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 9 Tahun 2011 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No.99/PMK.010/2011, dan telah diaktakan berdasarkan akta No. 03 tanggal 03 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Yuliani Idawati, S.H.Sp.N. Notaris di Kota Bandung. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-56159.AH.01.01 tahun 2012.

Perusahaan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan dan perusahaan dapat membuka cabang sebagaimana telah ditetapkan oleh direksi dengan persetujuan dewan komisaris.

Perusahaan bergerak dalam bidang penjamin pembiayaan kepada usaha mikro, kecil menengah dan koperasi, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut perusahaan dapat melaksanakan:

- Penjaminan kredit untuk penguatan modal bagi koperasi dan UMKM.
- Penjaminan pinjaman yang disalurkan Koperasi pada anggotanya.
- Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia.
- Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan BUMN dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- Penjaminan surat utang.
- Penjaminan transaksi dagang.
- Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (*surety bond*).
- Penjaminan bank garansi.
- Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri.
- Penjaminan *letter of credit*.
- Penjaminan kepabeanaan.
- Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan.
- Penyediaan informasi terjamin terkait dengan kegiatan usaha pejaminan.
- Penjaminan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perusahaan beroperasi di Gedung Bank BJB Kantor Cabang Pembantu Kopo lantai 3 di Jalan Kopo No. 54 Panjunan Bandung.

Tujuan pendirian PPKD (Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah) untuk meningkatkan penyaluran kredit produktif dan peningkatan LDR dari BPR, Bank Umum dan BPR yang terdapat di wilayah PPKD.

Dari sisi pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan kegiatan perekonomian daerah.

Dari sisi sosial lingkungan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengentasan kemiskinan.

Sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 04 tanggal 14 Mei 2014, Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan untuk mengangkat serta menetapkan Tuan Tri Budhi Muljawan sebagai Direktur Utama dan Tuan Budi Setyono sebagai Direktur Keuangan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun 2017 untuk Tahun Buku yang

Susunan Pengurus Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

2014:

Komisaris

- | | |
|-------------------|------------------------|
| • Komisaris Utama | : Rodhiallah |
| • Komisaris | : Iggi Haruman Achsien |
| • Komisaris | : Teguh Budiman |

Direksi

- | | |
|------------------------|----------------------|
| • Direktur Utama | : Tri Budhi Muljawan |
| • Direktur Keuangan | : Budi Setyono |
| • Direktur Operasional | : Asep Gunawan Sirad |

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Sesuai Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 55 tanggal 28 Juni 2013, Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan untuk mengangkat serta menetapkan Tuan Doktorandus Iman Chaerudin sebagai Direktur Keuangan dan Tuan Iggi Haruman Achsein sebagai Anggota Komisaris Perusahaan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun 2017 untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2016.

2013:

Komisaris

- Komisaris Utama : Rodhiallah
- Komisaris : Iggi Haruman Achsien
- Komisaris : Teguh Budiman, SE

Direksi

- Direktur Utama : H. M. Syahrul Davi, SK, MM
- Direktur : Asep Gunawan Sirad, SE
- Direktur : Iman Chaerudin

Per tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 perusahaan memiliki karyawan berturut-turut sebanyak 29 orang dan 20 orang.

Perusahaan dalam menjalankan usahanya telah memperoleh ijin-ijin sebagai berikut :

- 1) Salinan Keputusan Dewan Komisiner No. Kep.05/D.05/2013 tanggal 3 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Penjaminan Kredit Kepada PT. JAMKRIDA JABAR.
- 2) Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 20/DP/X/2012 tanggal 20 Oktober 2012 dari Pemerintah Kota Bandung.
- 3) Surat Izin Walikota Bandung Tentang Izin Gangguan/Kartu Herregistrasi IG/ITU No. 503/IG-840/BPPT tanggal 11 Desember 2012 dari Pemerintah Kota Bandung.
- 4) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) No. 101114618483 tanggal 11 Desember 2012 dari Pemerintah Kota Bandung.
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 31.625.184.2-422.000 dari Direktorat Jenderal Pajak Keuangan Republik Indonesia.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

Kebijakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan yang diterapkan oleh Perusahaan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Standar yang diterapkan secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan untuk masa yang berakhir pada 31 Desember 2014 dan 2013 adalah sebagai berikut:

a. Pernyataan Tanggung Jawab

Direksi bertanggung jawab sepenuhnya atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Laporan keuangan unaudited (*home statement*) telah diselesaikan pada 10 Januari 2015 dan laporan keuangan final telah disetujui untuk diterbitkan pada 26 Februari

b. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 dan 2013 disusun oleh Direksi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan PT JAMKRIDA JABAR disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Laporan keuangan disusun berdasarkan azas akrual dengan menggunakan konsep nilai perolehan, kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur dengan dasar sebagaimana dijelaskan di dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas disajikan dengan menggunakan metode langsung, yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp).

d. Usaha yang Berkelanjutan

Manajemen telah melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya yang cukup untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Perusahaan tidak memperoleh bukti objektif tentang ketidakpastian material yang dapat menimbulkan kerugian yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014 telah disusun atas dasar usaha

e. Penggunaan Pertimbangan, Estimasi, dan Asumsi

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia mengharuskan manajemen Perusahaan untuk menggunakan pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi kebijakan akuntansi, jumlah aset dan liabilitas serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Estimasi dan asumsi yang digunakan ditelaah secara berkesinambungan. Revisi atas estimasi akuntansi diakui pada periode dimana estimasi tersebut direvisi dan periode yang akan datang yang dipengaruhi oleh revisi estimasi tersebut.

f. Perubahan dalam Kebijakan Akuntansi

Berikut ini ikhtisar PSAK dan ISAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang relevan dengan Perusahaan, namun belum efektif untuk laporan keuangan 31 Desember 2014:

1. PSAK No. 1 (2013), "Penyajian Laporan Keuangan", yang diadopsi dari IAS 1, yang mengubah penyajian kelompok pos-pos dalam Penghasilan Komprehensif Lain. Pos-pos yang akan diklasifikasi ke laba rugi disajikan terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.
2. PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja", yang diadopsi dari IAS 19, yang menghapus mekanisme koridor dan pengungkapan atas informasi liabilitas kontinjensi untuk menyederhanakan klarifikasi dan pengungkapan.
3. PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan", yang diadopsi dari IAS 12. PSAK ini memberikan ketentuan tambahan untuk aset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari aset yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model reveluasi, dan yang timbul dari properti investasi yang diukur menggunakan model nilai wajar.
4. PSAK No. 48 (2014), "Penurunan Nilai Aset", diadopsi dari IAS 36. PSAK ini mensyaratkan pengungkapan tambahan untuk masing-masing aset individu (termasuk *goodwill*) atau unit penghasil kas yang terhadapnya kerugian penurunan nilai telah diakui atau balik selama periode

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Perubahan dalam Kebijakan Akuntansi (lanjutan)

5. PSAK No. 50 (2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", yang diadopsi dari IAS 32. PSAK ini memberikan panduan yang lebih rinci mengenai persyaratan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan serta kriteria untuk penyelesaian secara neto.
6. PSAK No. 55 (2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang diadopsi dari IAS 32. PSAK ini memberikan panduan yang lebih rinci mengenai persyaratan saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan serta kriteria untuk penyelesaian secara neto.
7. PSAK No. 60 (2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", yang diadopsi dari IFRS 7. PSAK ini antara lain memberikan ketentuan tambahan untuk pengungkapan saling hapus dengan menggunakan informasi kuantitatif dan kualitatif, dan pengungkapan atas pengalihan instrument
8. PSAK No. 68 (2014), "Pengukuran Nilai Wajar", yang diadopsi dari IFRS 13, memberikan panduan tentang bagaimana pengukuran nilai wajar ketika nilai wajar disyaratkan atau diizinkan.

Saat ini Perusahaan sedang mengevaluasi dan belum menetapkan dampak dari PSAK yang direvisi, disesuaikan dan dicabut tersebut terhadap laporan keuangan.

g. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas, bank, surat-surat berharga, efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, dan aset lain-lain.

Perusahaan menerapkan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" efektif sejak tanggal 1 Januari 2010, yang menggantikan PSAK No. 55 (Revisi 1999)."

Dampak penyesuaian atas penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) pada posisi 31 Desember 2014, aset keuangan yang dimiliki Perusahaan meliputi kategori:

- 1) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo
- 2) aset keuangan tersedia untuk dijual

Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut.

Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya. Aset keuangan yang dimiliki Perusahaan meliputi kategori:

- 1) Aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo

Investasi dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta Manajemen mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali:

- investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- investasi yang ditetapkan oleh entitas dalam kelompok tersedia untuk dijual; dan
- investasi yang memiliki definisi pinjaman yang diberikan dan piutang.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari investasi dimiliki hingga jatuh tempo dicatat dalam laporan laba rugi dan diakui sebagai 'Pendapatan bunga'.

Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat investasi dan diakui didalam laporan keuangan sebagai 'Cadangan Kerugian Penurunan Nilai'.

2) Aset keuangan tersedia untuk dijual

Kategori untuk diperdagangkan adalah aset dan kewajiban keuangan yang diperoleh atau dimiliki Perusahaan terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau dimiliki sebagai bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama untuk memperoleh laba jangka pendek atau *position taking*.

– Pengakuan Pendapatan dan Beban

- a. Aset tersedia untuk dijual serta aset keuangan dan kewajiban keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan suku bunga efektif.
- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan kewajiban keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual diakui sebagai pendapatan komprehensif lainnya, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar dari item moneter, sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

Liabilitas Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Liabilitas keuangan dikeluarkan ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau

Seluruh liabilitas keuangan termasuk kategori biaya perolehan diamortisasi.

Pada saat pengakuan awal liabilitas keuangan kategori biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset telah ditransfer (jika, secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Perusahaan melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kontrol yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan).

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan

Saling Hapus Aset Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam Laporan Posisi Keuangan jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

h. Piutang Regaransi

Pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggung mitra regaransi dicatat sebagai Piutang Dalam Penyelesaian.

Pengakuan piutang dalam penyelesaian dilakukan setiap terjadi pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra Regaransi. Piutang dalam penyelesaian diakui sebagai Piutang Regaransi tatkala mitra Regaransi mengaksep piutang dalam penyelesaian tersebut (sesuai dengan jangka waktu dalam Perjanjian Kerja Sama antara PT Jamkrida Jabar dengan mitra Regaransi), namun

Piutang usaha disajikan sebesar nilai bersihnya setelah dikurangi dengan cadangan piutang tak tertagih, yang jumlahnya ditentukan berdasarkan penelaahan terhadap keadaan tiap-tiap piutang pada

i. Beban Dibayar Dimuka

Beban dialokasikan sesuai dengan masa manfaat tiap-tiap biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

Beban Regaransi dibayar di muka dialokasikan secara proporsional mengikuti pola pengakuan pendapatan Imbal Jasa Penjaminan yang terkait dengan Regaransi.

j. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai (jika ada). Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi rutin yang signifikan dilakukan, yang merupakan suatu kondisi untuk menentukan kelangsungan operasional suatu jenis aset tetap, biaya atas masing-masing inspeksi signifikan tersebut diakui ke dalam jumlah tercatat ("*carrying amount*") aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba

j. Aset Tetap (lanjutan)

Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus, berdasarkan taksiran masa manfaat laporan, sebagai berikut :

Aset Tetap	Masa Manfaat (tahun)
Bangunan Gedung	20-30
Instalasi	15
Inventaris Kantor	2-10
Kendaraan Bermotor	5

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laporan laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Biaya pinjaman, termasuk rugi selisih kurs, yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau konstruksi aset tetap dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan tersebut. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat aset tersebut telah selesai dan siap untuk

Sesuai dengan PSAK No. 47, "Akuntansi Tanah" perolehan tanah setelah tanggal 1 Januari 1999 dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Biaya-biaya tertentu sehubungan dengan perolehan atau perpanjangan hak pemilikan atas tanah, ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang periode pemilikan hak atas tanah.

Selanjutnya PSAK No. 48, "Penurunan Nilai Aktiva", mengharuskan nilai aset dikaji ulang atas kemungkinan penurunan pada nilai wajarnya yang disebabkan oleh peristiwa atau perubahan keadaan yang menyebabkan nilai tercatat aset mungkin tidak dapat dipulihkan.

Nilai residu aset adalah jumlah yang diperkirakan akan diperoleh entitas saat ini atau merupakan taksiran nilai atau potensi arus kas masuk apabila aktiva tersebut dijual pada saat penarikan/penghentian (*retirement*) aktiva.

Pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direview, dan jika sesuai dengan keadaan, disesuaikan secara prospektif.

k. Aset Lain-lain

1) Piranti Lunak Komputer / Software

Lisensi piranti lunak komputer yang diperoleh dikapitalisasi sebesar biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan membuat piranti lunak tersebut siap untuk digunakan. Biaya ini diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya (3-5 tahun).

Biaya yang berhubungan dengan pengembangan atau pemeliharaan program piranti lunak komputer diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya-biaya yang terkait langsung dengan produksi piranti lunak yang unik dan dapat diidentifikasi serta dikendalikan oleh Perusahaan dan kemungkinan besar akan memberikan manfaat ekonomi yang melebihi biayanya dalam jangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai aset tak berwujud. Biaya-biaya langsung ini meliputi, antara lain, biaya karyawan yang turut mengembangkan piranti lunak dan porsi biaya *overhead*

Biaya pengembangan piranti lunak komputer yang diakui sebagai aset dan diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya (tidak lebih dan 3 tahun).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset Lain-lain (lanjutan)

2) Aset Lainnya

Merupakan aset diluar *software* dengan kriteria aset ini dapat memberikan manfaat ekonomik masa datang, dan dapat memberikan nilai lebih bagi perusahaan dan untuk mendapatkannya akibat dari transaksi atau kejadian.

l. Sewa

Efektif tanggal 1 Januari 2008, PSAK No. 30 (Revisi 2007), "Sewa", menggantikan PSAK No. 30 (1990), "Akuntansi Sewa Guna Usaha". Berdasarkan PSAK No. 30 (Revisi 2007), penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Menurut PSAK revisi ini, sewa yang mengalihkan secara substansi seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

Pada awal masa sewa, Lessee mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan kewajiban dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan kewajiban. Beban keuangan dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa. Aset sewaan yang dimiliki oleh lessee dengan dasar sewa pembiayaan disusutkan konsisten dengan metode yang sama yang digunakan untuk aset yang dimiliki sendiri, atau disusutkan secara penuh selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaat aset sewaan, jika tidak ada kepastian yang memadai bahwa lessee kepemilikan pada akhir masa sewa.

Selisih lebih hasil penjualan dan nilai tercatat yang terjadi dari suatu transaksi jual dan sewa-balik ("*sale-and-lease back*") yang merupakan sewa pembiayaan ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus ("*straight-line method*") selama sisa manfaat aset yang

m. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dicatat dan diakui atas dasar akrual (*accrual basis*) kecuali untuk imbal hasil atas penempatan dana dengan pola syariah dicatat dan diakui atas dasar kas (*cash basis*). Beban diakui sesuai dengan masa manfaatnya pada tahun yang bersangkutan (*accrual basis*) Pengakuan klaim dianggap sebagai beban sebagai beban klaim setelah Komite Klaim menyetujui untuk melakukan pembayaran dan setelah diterbitkannya surat persetujuan klaim kepada pihak penerima jaminan.

n. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam Rupiah untuk mencerminkan nilai kurs rata-rata antara kurs jual dan kurs beli yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada hari terakhir transaksi perbankan pada tahun tersebut. Laba atau rugi selisih kurs yang terjadi dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun berjalan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Imbalan Kerja Karyawan

Perusahaan mengakui kewajiban kerja karyawan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("Undang-Undang") dan PSAK No. 24 (Revisi 2004), "Imbalan Kerja".

Sesuai dengan PSAK No. 24 (Revisi 2004), "Imbalan Kerja", beban imbalan kerja karyawan berdasarkan Undang-undang dihitung dengan menggunakan metode penilaian aktuaris *project-unit-credit*. Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial bersih yang belum diakui dari masing-masing program pada akhir tahun pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti pada tanggal tersebut. Keuntungan biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut telah menjadi hak (*vested*). Sebaliknya, akan diamortisasi dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi hak karyawan, atau kerugian diakui secara merata selama rata-rata

p. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer pada setiap tanggal laporan antara aset dan kewajiban untuk tujuan komersial aset dan kewajiban untuk tujuan perpajakan. Manfaat pajak masa yang akan datang, seperti rugi pajak yang dapat dikompensasi, juga diakui apabila besar kemungkinan manfaat tersebut dapat direalisasi.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang akan berlaku pada saat aset dipulihkan atau kewajiban dilunasi, yaitu dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal neraca.

Perubahan nilai tercatat aset dan kewajiban pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada operasi tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan atas kewajiban perpajakan dicatat ketika ketetapan pajak diterima atau jika keberatan diajukan oleh Perusahaan, ketika hasil dari keberatan tersebut telah ditentukan.

q. Imbal Jasa Penjaminan, Fee based Income Bank Pelaksana, dan Beban *Regaransi*

Pendapatan imbal jasa penjaminan, fee based income bank pelaksana dan beban *regaransi* diakui pada saat Sertifikat Penjaminan diterbitkan.

Pendapatan imbal jasa penjaminan, fee based income bank pelaksana dan beban *regaransi* diakui selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan bulan terbitnya Sertifikat Penjaminan

Batas waktu maksimal pengakuan imbal jasa penjaminan, fee based income bank pelaksana dan beban *regaransi* adalah 4 tahun dan diakui ulang tahun.

Pendapatan imbal jasa penjaminan disajikan secara bruto.

Imbal jasa penjaminan yang sudah diterima namun belum diakui sebagai pendapatan disajikan sebagai pendapatan diterima dimuka. Fee based Income bank pelaksana dan beban *regaransi* yang sudah dibayarkan namun belum diakui sebagai beban disajikan sebagai beban dibayar dimuka.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Hutang Klaim

Hutang klaim merupakan hutang Perusahaan kepada Bank pemberi pinjaman yang dijamin oleh Perusahaan. Hutang klaim yang tercatat adalah hutang yang telah diproses dan disetujui namun belum dibayar. Hutang klaim dinyatakan sebesar prosentase penjaminan atas baki debit pinjaman

s. Cadangan Klaim

Cadangan klaim ditetapkan sebesar 0,25% dari outstanding penjaminan. Cadangan klaim minimal yang dapat dibentuk ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 6/POJK.5/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan Pasal 9, yaitu minimal sebesar 0,25% dari outstanding Penjaminan yang ditanggung perusahaan.

Kenaikan/(penurunan) cadangan klaim merupakan selisih cadangan klaim periode berjalan dan periode sebelumnya.

t. Transaksi dengan Pihak-Pihak yang Berelasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

a. Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :

- i Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor,
- ii memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
- iii personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- i entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain),
- ii suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya),
- iii kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama,
- iv satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga,
- v entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor,
- vi entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir
- vii orang yang diidentifikasi, dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan persyaratan dan kondisi yang sama dengan yang diberlakukan kepada pihak ketiga telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Informasi Segmen

Sehubungan dengan penerapan PSAK No. 5 (Revisi 2000), “Pelaporan Segmen”, Perusahaan menyajikan informasi keuangan berdasarkan segmen usaha dan segmen geografis. Sesuai dengan struktur organisasi dan manajemen serta sistem pelaporan internal Perusahaan, Informasi segmen primer disajikan berdasarkan segmen usaha dan informasi segmen sekunder disajikan berdasarkan

Segmen geografis adalah komponen perusahaan yang dapat dibedakan dalam menghasilkan produk atau jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain.

3. KAS DAN SETARA KAS

	2014	2013
Kas	85.468.658	42.268.985
Giro Bank		
Pihak Berelasi		
Bank BJB	365.546.931	341.246.542
Pihak Ketiga		
Bank Saudara	19.550	604.769
Bank Artos	1.473.710	6.050.702
Bank Danamon	1.446.958	1.346.681
Bank BNI	4.917.836	12.119.472
Bank Syariah Mandiri	1.915.180	-
Bank Yudha Bhakti	2.500.162	-
BPR Kab Bandung (Soreang)	487.117	498.225
BPR Cagak	3.853.410	-
BPR Kota Garut	5.560.612	-
BPR Astanajapura	9.389.006	-
BPR Pasar Bogor	2.702.139	-
BPR Leuwi Liang	5.277.584	-
BPR Pancoran Mas	1.619.126	-
BPR Parung Panjang	2.964.145	-
BPR Sukra	8.174.469	-
BPR Cipatujah	6.943.632	-
BPR Kroya	3.729.447	-
BPR Cantigi	8.171.127	-
BPR Balongan	4.237.850	-
BPR Bongas	702.461	-
Jumlah Giro Bank	441.632.452	361.866.391

3. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)		
Deposito		
Pihak Berelasi		
Bank BJB	54.910.952.551	56.300.000.000
Pihak Ketiga		
Bank BTPN	2.000.000.000	-
Bank Danamon	-	12.000.000.000
Bank Artos	11.000.000.000	7.500.000.000
Bank BNI	3.000.000.000	-
BPR Jalancagak Subang	300.000.000	-
BPR LPK Garut	150.000.000	-
BPR Bumi Bandung Kencana	1.500.000.000	-
BPR Duta Pasundan	500.000.000	-
BPRS Cipaganti Syariah	-	2.000.000.000
BPR Astanajapura	800.000.000	-
Bank Panin Syariah	2.100.000.000	10.000.000.000
Bank Muamalat	11.000.000.000	3.000.000.000
Bank BJB Syariah	6.500.000.000	3.000.000.000
Bank Syariah Mandiri	-	1.000.000.000
Bank Yudha Bhakti	4.000.000.000	-
BPR Leuwiliang	100.000.000	-
BPR Pancoranmas	50.000.000	-
BPR Parungpanjang	200.000.000	-
Bank Mayapada	1.000.000.000	-
BPR Cipatujah	80.000.000	-
BPR Cantigi	50.000.000	-
BPR Sukra	50.000.000	-
Jumlah Deposito	99.290.952.551	94.800.000.000
Jumlah Kas dan Setara Kas	99.818.053.661	95.204.135.376

Pendapatan deposito berjangka tersebar di beberapa perbankan dengan tingkat suku bunga yang beragam dari 8,5 % p.a. s/d 10,5 % p.a pada tahun 2013 dan 8,5 % p.a. s/d 11,00 % p.a. pada tahun

4. ASET KEUANGAN YANG DIMILIKI HINGGA JATUH TEMPO		
Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo per 31 Desember 2014 dan 2013 merupakan deposito berjangka yang ditempatkan pada:		
	2014	2013
Bank Panin Syariah	-	4.000.000.000
Jumlah Aset Keuangan	-	4.000.000.000

5. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA		
Pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2014 dan 2013 terdiri dari:		
	2014	2013
Pendapatan Bunga Deposito	197.314.411	215.760.057
Piutang Regaransi	136.365.188	-
Jumlah Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	333.679.599	215.760.057

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan pendapatan bunga deposito dan Piutang regaransi atas klaim dan restitusi kepada perusahaan Reasuransi PT Nasional Reasuransi Indonesia

6. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2014 dan 2013 terdiri dari :

	2014	2013
Asuransi Kendaraan	28.202.703	56.175.799
Asuransi Kesehatan	-	41.526.081
Sewa Kendaraan	12.000.000	11.900.000
IJP Regaransi	3.706.507.036	684.644.681
Fee Based Income	40.546.423	9.109.627
Komisi Agen/Broker	1.375.789.627	314.748.811
Piutang Lainnya	2.850.000	-
Beban Adm & Umum Lainnya	16.255.149	-
Jumlah Beban Dibayar Dimuka	5.182.150.938	1.118.104.999

Beban dialokasikan sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus. Masa manfaat asuransi kendaraan, asuransi kesehatan dan sewa kendaraan sesuai dengan jangka waktu kontrak atau polis.

Beban IJP Regaransi dan *Fee Based Income* dibayar dimuka diakui selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan tahun terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP). Dengan mempertimbangkan banyaknya pinjaman yang dipercepat pelunasannya, manajemen menetapkan batas waktu maksimal fee based income bank pelaksana dan beban Regaransi adalah empat tahun.

Beban dibayar dimuka Regaransi merupakan Pembayaran IJP tahun berjalan dan tahun-tahun lalu ke mitra Regaransi yang akan menjadi beban di tahun-tahun mendatang.

Manajemen berkeyakinan biaya dibayar dimuka untuk IJP Regaransi dan *Fee Based Income* telah dialokasikan sesuai jangka waktu penjaminan.

7. ASET TETAP

Aset tetap per 31 Desember 2014 dan 2013 terdiri dari :

	2014			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Perolehan				
Inventaris Kantor	404.906.881	127.651.740	-	532.558.621
Kendaraan	1.048.250.000	-	-	1.048.250.000
Jumlah	1.453.156.881	127.651.740	-	1.580.808.621
Akumulasi Penyusutan				
Inventaris Kantor	(53.133.556)	(91.160.585)	-	(144.294.141)
Kendaraan	(207.505.000)	(157.237.500)	-	(364.742.500)
Jumlah	(260.638.556)	(248.398.085)	-	(509.036.641)
Nilai Buku	1.192.518.325			1.071.771.980

7. ASET TETAP (lanjutan)				
	2013			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Nilai Perolehan				
Inventaris Kantor	7.574.000	397.332.881	-	404.906.881
Kendaraan	1.033.950.000	14.300.000	-	1.048.250.000
Jumlah	1.041.524.000	411.632.881	-	1.453.156.881
Akumulasi Penyusutan				
Inventaris Kantor	(1.514.800)	(51.618.756)	-	(53.133.556)
Kendaraan	-	(207.505.000)	-	(207.505.000)
Jumlah	(1.514.800)	(259.123.756)	-	(260.638.556)
Nilai Buku	1.040.009.200			1.192.518.325

Aset tetap belum diasuransikan terhadap risiko kebakaran, kebongkaran, gempa bumi, kecelakaan dan risiko lainnya. Manajemen berpendapat bahwa semua aset tetap tersebut relatif aman. Aset tetap disusutkan setelah dikurangi dengan nilai residu dengan besaran yang telah ditentukan sesuai dengan kebijakan perusahaan

Manajemen berkeyakinan tidak terdapat indikasi penurunan nilai terhadap aset tetap perusahaan. Beban penyusutan dialokasikan sebagai beban usaha dan pembenanan untuk tahun 2014 dan 2013 berturut-turut sebesar Rp248.398.085 dan Rp259.123.756.

8. ASET LAIN-LAIN		
Aset lain-lain per 31 Desember 2014 dan 2013 terdiri dari :		
	2014	2013
<i>Software</i>	113.887.755	93.888.115
Aset Lainnya	175.000.000	274.000.000
Harga Perolehan Aset Lain-lain	288.887.755	367.888.115
Akumulasi Amortisasi <i>Software</i>	(32.673.257)	(20.323.975)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(57.812.500)	(8.812.500)
Akumulasi Amortisasi Aset Lain - lain	(90.485.757)	(29.136.475)
Nilai Buku Aset Lain-lain	198.401.998	338.751.640
Aset Dalam Penyelesaian		
Gedung Dalam Proses	7.104.425.000	-
Pembuatan Aplikasi Software Dalam Proses	135.000.000	-
Jumlah Aset Dalam Penyelesaian	7.239.425.000	-
Jumlah Aset Lain-Lain	7.437.826.998	338.751.640

Software adalah pengeluaran untuk mendapatkan lisensi perangkat lunak computer atau pengeluaran untuk membuat perangkat lunak computer oleh pihak ketiga dikapitalisir dan diamortisasi selama 4 tahun.

Aset lainnya merupakan saldo pengeluaran untuk website sistem PT Jamkrida jabar, sistem SDM PT Jamkrida jabar, dan sistem Job analisis PT Jamkrida jabar dengan estimasi empat tahun dan metode amortisasi yang digunakan metode garis lurus.

Pada tahun 2014 terdapat pengadaan atas Renovasi gedung dan Pengadaan Furniture yang terdiri dari 4 (empat) SPK dengan total sebesar Rp1.354.708.000, namun belum diakui sebagai aset lain-lain karena progres sesuai termin belum terjadi pada tahun 2014. Renovasi gedung dan pengadaan furniture merupakan anggaran tahun 2014

9. HUTANG REGARANSI

Hutang Regaransi per 31 Desember 2014 dan 2013 terdiri dari :

	2014	2013
Best One Asia Reinsurance Broker (BOARE)	233.583.481	110.662.822
Jumlah Hutang Regaransi	233.583.481	110.662.822

Hutang kepada Best One Asia Reinsurance Broker (BOARE) merupakan Hutang IJP yang harus dibayarkan perusahaan untuk mengalihkan resiko klaim yang diakibatkan meninggal, PHK dan macet atas terjamin atas Kredit Multiguna, KCR, Mikro dan Umum. Dicatat secara akrual sesuai dengan tarif

10. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

Beban yang masih harus dibayar per 31 Desember 2014 dan 2013 terdiri dari :

	2014	2013
CV Sarana Komunikasi Global	-	16.400.000
CV Etenrnity Global Solution	-	78.163.636
Tunjangan Makan dan Transportasi Karyawan	-	11.194.500
Biaya Notaris	95.062.500	-
Aplikasi IJP	7.000.000	-
Aplikasi Syariah	52.000.000	-
Uang Lembur Karyawan	22.692.095	-
Biaya Keamanan, Parkir, AMDK dan Koran	1.861.000	-
Pengadaan Kalender 2014	82.850.000	-
	261.465.595	105.758.136

Merupakan kewajiban perusahaan yang masih harus dibayar kepada vendor atas kerjasama yang dilakukannya dengan PT Jamkrida Jabar, Biaya Keamanan, Parkir, AMDK dan Koran serta uang lembur karyawan bulan Desember 2013 yang biasa dibayarkan setiap tanggal 7 bulan berikutnya.

11. PENAMPUNGAN SEMENTARA

Penampungan sementara per 31 Desember 2014 dan 2013 terdiri dari :

	2014	2013
BJB Kopo	363.167.154	56.880.112
BJB Ciamis	57.878.716	12.495.424
BJB Garut	82.434.901	13.392.851
BJB Tasik	50.964.997	47.760
BJB Sumber	8.654.904	600.000
BJB Cirebon	9.028.500	66.000
BJB Taman sari	207.777.192	133.978.459
BJB Suci	3.128.291	1.146.000
BJB Soreang	2.602.932	7.852.650
BJB Cab Utama	3.880.817	1.766.440
BJB Bubat	208.533.663	75.789.717
BJB Cibinong	12.007.914	1.190.373
BJB Bekasi	130.411.201	8.014.500
BJB Karawang	-	2.034.846
BJB Pasteur	59.040.026	7.046.307
BJB Cikarang	1.107.000	3.937.500
BJB Subang	5.040.000	90.000
BJB Cilegon	3.385.476	2.369.931
BJB Serang	6.455.106	-
BJB Jatinangor	1.799.595	-
BJB Banjar	11.766.450	-
BJB Purwakarta	2.279.636	-
BJB Bogor	8.955.216	-
BJB Singaparna	481.304	-
BJB Sukabumi	19.675.690	-
BJB Cianjur	11.175.000	-
BJB Kuningan	40.245.212	-
BJB Pangandaran	2.025.000	-
BJB Padalarang	8.088.750	-
Bank Artos	18.536.535	270.000
BPR Astanajapura	58.286.203	-
BPR LPK Garut Kota	5.498.550	-
BPR Pasar Kota Bgr	5.869.950	-
BPR Parung Panjang	41.868.875	-
BPR Bongas	297.500	-
Bank Yudha Bhakti	1.590.000	-
Jumlah Penampungan Sementara IJP	1.453.938.256	328.968.870

Akun dalam penyelesaian imbal jasa penjaminan kredit eksisting terdiri dari Imbal Jasa Penjaminan yang telah diterima namun belum diterbitkan Sertifikat Penjaminan (SP)-nya, kelebihan pembayaran IJP.

Imbal Jasa Penjaminan yang telah diterima merupakan IJP yang belum diterbitkan Sertifikat Penjaminannya karena berkas permohonan penerbitan Sertifikat Penjaminan belum lengkap atau terdapat kekurangan pembayaran IJP.

Penampungan sementara subrogasi merupakan bagian yang harus dibayar kepada pihak regaransi atas pendapatan subrogasi yang telah diterima oleh perusahaan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.

12. HUTANG LANCAR LAINNYA

Hutang lancar lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 terdiri dari :

	2014	2013
Hutang Kendaraan Jatuh Tempo Kurang dari 1 tahun	239.854.992	239.855.004
Pembayaran Klaim dari Asuransi Manulife	-	1.089.600
Pembayaran Premi Jamsostek	6.580.704	7.606.560
Jumlah Hutang Lancar Lainnya	246.435.696	248.551.164

Merupakan kewajiban perusahaan yang penyelesaiannya kurang dari satu tahun terdiri dari Hutang kendaraan, dan premi jamsostek.

13 PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Pendapatan diterima dimuka per 31 Desember 2014 dan 2013 terdiri dari :

	2014	2013
Imbal Jasa Penjaminan		
Imbal Jasa Penjaminan - Pihak Berelasi	8.901.616.021	2.523.192.304
Imbal Jasa Penjaminan - Pihak Ketiga	1.862.507.193	216.170.105
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	10.764.123.214	2.739.362.409

Imbal Jasa Penjaminan diterima dimuka merupakan pembayaran IJP penjaminan tahun berjalan dari Terjamin kepada Perusahaan yang akan menjadi pendapatan di tahun-tahun mendatang.

Imbal Jasa Penjaminan diterima dimuka akan diakui sebagai pendapatan IJP selama sisa jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan tahun terbitnya Sertifikat Penjaminan (SP). Dengan mempertimbangkan banyaknya kredit yang dipercepat pelunasannya, manajemen menetapkan batas waktu maksimal alokasi Imbal Jasa Penjaminan diterima dimuka adalah empat tahun.

14. CADANGAN KLAIM

Cadangan klaim per 31 Desember 2014 dan 2013 terdiri dari :

	2014	2013
Saldo Awal	223.705.274	-
Penambahan Cadangan Klaim	677.696.449	223.705.274
Pengurangan Cadangan Klaim	-	-
Jumlah Cadangan Klaim	901.401.723	223.705.274

Cadangan Klaim merupakan pembentukan cadangan atas klaim yang mungkin akan terjadi di tahun-tahun mendatang atas penjaminan yang belum jatuh tempo.

Cadangan klaim ditetapkan sebesar 0,25% dari outstanding penjaminan. Cadangan klaim minimal yang dapat dibentuk ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 6/POJK.5/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan Pasal 9, yaitu minimal sebesar 0,25% dari outstanding Penjaminan yang ditanggung perusahaan.

15. PERPAJAKAN

a. Hutang Pajak

Hutang Pajak per 31 Desember 2014 dan 2013 terdiri dari:

	2014	2013
PPh Pasal 21	15.659.808	60.453.026
PPh Pasal 23	4.166.345	4.283.534
Jumlah Hutang Pajak	19.826.153	64.736.560

Hutang pajak PPh Pasal 21 adalah hutang pajak atas pajak pendapatan karyawan pada 31 Desember 2014 yang menjadi tanggungan perusahaan, pajak atas pendapatan Direksi dan Komisaris yang dipotong oleh perusahaan dan pajak atas honorarium. Hutang pajak Pasal 23 adalah hutang pajak dikarenakan pihak perusahaan sebagai pemotong pajak atas kegiatan yang diatur dalam PPh pasal 23 tersebut.

b. Beban Pajak

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 dan 2013

	2014	2013
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	3.899.006.032	(475.401.360)
Perbedaan Temporer:		
Perbedaan Penyusutan antara Fiskal dan Komersil	39.146.175	62.989.280
Kenaikan Cadangan Klaim	677.696.449	223.705.274
Beban Imbalan Pasca Kerja	22.152.960	60.952.551
Jumlah	738.995.584	347.647.105
Perbedaan Permanen:		
Beban Promosi	339.724.272	350.337.170
Beban Perjalanan Dinas	303.468.774	198.575.000
Beban Diklat Karyawan	117.247.825	-
Pemeliharaan Kendaraan	75.822.934	2.798.248
Beban Percetakan	-	7.622.376
Beban Komunikasi Lain	-	8.409.754
Beban Representasi	116.290.706	49.628.248
Pembuatan Website	-	25.000.000
Tunjangan Kesehatan	111.852.394	107.900.704
Biaya Rekrutmen	-	4.250.000
Tunjangan Baju	50.300.000	5.286.000
Beban Umum Lainnya	192.437.412	200.145.788
Pendapatan yang Dikenakan PPh Final:		
Pendapatan Deposito dan Pendapatan Jasa Giro	(9.830.600.521)	(6.065.156.750)
Jumlah	(8.523.456.205)	(5.105.203.462)
Rugi Fiskal Tahun Berjalan	(3.885.454.588)	(5.232.957.717)
Rugi (dibulatkan)	(3.885.454.000)	(5.232.957.000)
Kompensasi Kerugian Pajak Tahun Lalu	(5.998.988.000)	(766.031.000)
Rugi Fiskal yang dapat Dikompensasi	(9.884.442.000)	(5.998.988.000)

15. PERPAJAKAN (lanjutan)		
	2014	2013
Beban Pajak Penghasilan Kini:		
Non Final	-	-
Final	(1.966.120.104)	(1.029.129.751)
Beban Kini	(1.966.120.104)	(1.029.129.751)

c. Pajak Tangguhan			
	2014		
	Manfaat		
	01 Januari 2014	(Beban) Pajak Tangguhan	31 Desember 2014
Penyusutan Aset Tetap	16.769.820	57.443.199	74.213.019
Imbalan kerja	15.238.138	5.538.240	20.776.378
Kenaikan (penurunan) Cadangan Klaim	55.926.318	113.497.794	169.424.112
Kerugian Fiskal yang dapat dikompensasi	1.499.747.000	971.363.500	2.471.110.500
Jumlah	1.587.681.276	1.147.842.733	2.735.524.009
	2013		
	Manfaat		
	01 Januari 2013	(Beban) Pajak Tangguhan	31 Desember 2013
Penyusutan Aset Tetap	-	16.769.820	16.769.820
Imbalan kerja	-	15.238.138	15.238.138
Kenaikan (penurunan) Cadangan Klaim	-	55.926.318	55.926.318
Kerugian Fiskal yang dapat dikompensasi	191.507.750	1.308.239.250	1.499.747.000
Jumlah	191.507.750	1.396.173.526	1.587.681.276

16. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2014 dan 2013 terdiri dari :		
	2014	2013
Hutang Kendaraan Jatuh Tempo Lebih dari 1 tahun	-	239.854.992
Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	83.105.511	60.952.551
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	83.105.511	300.807.543

Merupakan kewajiban imbalan pasca kerja yang diselenggarakan oleh perusahaan dengan program manfaat pasti (JHT dan THT) maupun program iuran pasti (DPLK) untuk seluruh karyawan tetapnya.

Pada tahun 2014 Manajemen menunjuk aktuaris independen PT Kompujasa Aktuaria Indonesia untuk melakukan perhitungan beban/manfaat pasca kerja sesuai dengan PSAK 24 (Revisi 2010) untuk tahun 2014 dan 2013.

16. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

Dalam mengestimasi manfaat pensiun per 31 Desember 2014 dan 2013 untuk kedua program tersebut di atas, Aktuaris dalam perhitungannya menggunakan Projected Unit Credit Actuarial Cost Method, yang perhitungannya mengacu kepada tingkat pembiayaan yang sebenarnya diperlukan dalam satu periode. Asumsi utama yang digunakan dalam perhitungan aktuaria adalah sebagai berikut :

	2014	2013
Tingkat Diskonto	8,5%	9%
Kenaikan gaji per tahun	3%	3%
Tabel Mortalita	TMI 2011	TMI 2011
Tingkat Cacat	10%	10%
Usia Pensiun Normal	55 tahun	55 tahun

Program Pensiun
Kewajiban (aset) program pensiun manfaat pasti sebagai berikut:

	2014	2013
Rekonsiliasi Aset/Kewajiban yang diakui di Laporan Posisi Keuangan		
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	83.105.511	60.592.551
Nilai wajar setiap aset program	-	-
Status Pendanaan	83.105.511	60.592.551
(Keuntungan)/Kerugian aktuaria yang belum diakui	-	-
Biaya Jasa Lalu yang belum diakui non - vested	-	-
(Aset)/Kewajiban yang diakui di Laporan Posisi Keuangan	83.105.511	60.592.551
	2014	2013
Rekonsiliasi biaya manfaat yang diakui di Laporan Laba Rugi Komprehensif		
Biaya Jasa Kini	45.171.238	60.592.551
Biaya Bunga	5.485.729	-
Hasil yang diharapkan dari aset program	-	-
(Keuntungan) / Kerugian Aktuaria yang Diakui	(28.504.007)	-
Biaya pemutusan hubungan kerja	-	-
Biaya Jasa Lalu vested yang belum diakui	-	-
Amortisasi biaya jasa lalu - non vested	-	-
Dampak kurtailmen atau penyesuaian	-	-
Total biaya manfaat karyawan	22.152.960	60.592.551
	2014	2013
Rekonsiliasi perubahan pada aset/kewajiban yang diakui di Laporan Posisi Keuangan		
(Aset)/Kewajiban pada awal periode	60.952.551	60.952.551
Beban yang diakui di laba / rugi	22.152.960	-
Biaya (Pendapatan) komprehensif lainnya	-	-
Pembayaran iuran	-	-
Pembayaran manfaat - Terminasi (PKK) / Efisiensi	-	-
Pembayaran manfaat - UUK	-	-
(Aset)/kewajiban pada tanggal di Laporan Posisi Keuangan	83.105.511	60.952.551

17. EKUITAS

	2014	2013
Penyertaan Modal	100.200.000.000	100.200.000.000
Saldo Laba (Rugi) Tahun Sebelumnya	(665.601.104)	(557.243.519)
Lab a (Rugi) Tahun Berjalan	3.080.728.661	(108.357.585)
Jumlah Ekuitas	102.615.127.557	99.534.398.896

Berdasarkan akta notaris Yulianti Idawati, S.H., Sp.N, No. 3 tanggal 3 Oktober 2012, modal dasar perusahaan adalah sebesar Rp300.000.000.000 dari 30.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10.000.000, dan berdasarkan akta No. 60 tanggal 26 Desember 2012 dari notaris yang sama tentang keputusan para pemegang saham diluar rapat perseroan terbatas PT JAMKRIDA JABAR (keputusan

- I. Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil bagian 7.500 (tujuh ribu lima ratus) lembar saham atau sebesar Rp 75.000.000.000 dengan dua tahap penyetoran yaitu:
 - a) Tahap pertama sebelum penandatanganan akta sebesar Rp25.000.000.000.
 - b) Tahap kedua sesudah penandatanganan akta sebesar Rp50.000.000.000.
 - c) Tahap ketiga sesudah penandatanganan akta sebesar Rp25.000.000.000.
- II. Yakes Pegawai Bank BJB mengambil bagian 20 (dua puluh) lembar saham atau sebesar

Setoran modal tahap pertama dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 937/1864/PM/LS/KEU tanggal 21 Desember 2012 sebesar Rp 25.000.000.000 dan setoran modal dari Yayasan Kesehatan Pegawai Bank BJB pada tanggal 1 Nopember 2012 sebesar Rp 200.000.000, kedua setoran modal dari para pemegang saham tersebut diterima pada Bank BJB No. rekening 00228688871001 atas nama PT JAMKRIDA JABAR.

PT. JAMKRIDA JABAR telah menerima setoran modal tahap ke dua dari Pemerintah Provinsi Jabar sebesar Rp. 50.000.000.000 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/53/PM/LS/2013 tanggal 18 Januari 2013 sebesar Rp. 50.000.000.000, Pada tanggal 27 November 2013 berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 931/2041/PM/LS/2013 terdapat penyertaan modal dari pemprov sebesar Rp. 25.000.000.000,-.

Sehingga komposisi modal ditempatkan dan disetor oleh para pemegang saham sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Saham (Lembar)	Nominal (Rp)	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	10.000	10.000.000	100.000.000.000	99,80%
YKP Bank BJB	20	10.000.000	200.000.000	0,20%
Jumlah	10.020	20.000.000	100.200.000.000	0,00%

Analisis Gearing Ratio

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan, Gearing Ratio adalah batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan Penjamin dalam melakukan kegiatan Penjaminan.

Gearing Ratio merupakan perbandingan antara total nilai outstanding Penjaminan yang ditanggung sendiri dengan modal sendiri bersih Penjamin pada waktu tertentu. Modal sendiri bersih terdiri dari penempatan modal Pemerintah, cadangan-cadangan, saldo laba, dan komponen ekuitas lainnya dikurangi kerugian.

17. EKUITAS (lanjutan)

Gearing Ratio Penjaminan untuk Usaha Produktif ditetapkan paling tinggi sepuluh kali dari ekuitas Perusahaan dan total Gearing Ratio ditetapkan paling tinggi empat puluh kali dari ekuitas Perusahaan.

$$\text{GR Produktif} = \frac{71.334.737.898}{102.615.127.557} = 0.70x$$

$$\text{Total GR} = \frac{360.560.683.218}{102.615.127.557} = 3.51x$$

Gearing Ratio PT Jamkrida Jabar per 31 Desember 2014 untuk yang produktif sebesar 0.70x dan secara total sebesar 3.51x.

18. JASA JAMINAN KREDIT

Jasa jaminan kredit per 31 Desember 2014 dan 2013 terdiri dari :

	2014	2013
Imbal Jasa Jaminan	6.300.164.188	1.349.595.129
Beban Fee Based Income Bank	(20.498.694)	(4.384.233)
Beban Komisi Agen	(732.507.308)	(106.807.695)
Restitusi IJP	(53.179.740)	-
Management Fee	191.644.192	24.647.040
Jumlah Jasa Jaminan Kredit	5.685.622.638	1.263.050.241

Pendapatan Imbal Jasa penjaminan (IJP) adalah premi yang diterima oleh perusahaan dari terjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan. Besarnya IJP dihitung dari tarif IJP, plafond kredit dan jangka

Untuk kredit eksisting, besarnya tarif IJP ditetapkan dengan mempertimbangkan antara lain: produk penjaminan, risiko yang dijamin dan jangka waktu penjaminan. IJP kredit umum dibayar sekaligus di

Biaya komisi agen sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pada POJK 6/ POJK.05/2014 BAB II Pasal 4 (6) adalah maksimal sebesar 20 % dari nilai imbal jasa penjaminan. Tarif biaya komisi agen dan fee base income bank yang berlaku di PT Jamkrida Jabar adalah sebesar 15% dan dibebankan selama jangka waktu penjaminan dan dialokasikan berdasarkan tahun terbit sertifikat penjaminan (SP) dengan batas

19. PENDAPATAN INVESTASI

Pendapatan investasi per 31 Desember 2014 dan 2013 terdiri dari :

	2014	2013
Pendapatan Bunga Deposito	9.788.727.309	5.108.318.478
Jumlah Pendapatan Investasi	9.788.727.309	5.108.318.478

20. BEBAN KLAIM

Beban klaim per 31 Desember 2014 dan 2013 terdiri dari :

	2014	2013
Beban Klaim	913.359.561	2.896.645
Beban Cadangan Klaim	677.696.449	223.705.274
Beban Regaransi	1.999.441.553	411.899.696
Jumlah Beban Klaim	3.590.497.563	638.501.615

21. BEBAN USAHA

Beban usaha per 31 Desember 2014 dan 2013 terdiri dari :

	2014	2013
Beban Operasional	823.144.129	788.073.825
Beban Sumber Daya Manusia	5.814.618.121	4.426.047.465
Beban Administrasi Kantor dan Umum	1.414.672.147	1.031.477.447
Jumlah Beban Operasional	8.052.434.397	6.245.598.737

Rincian jumlah beban operasional adalah :

	2014	2013
Beban Promosi	339.724.272	350.337.170
Beban Perjalanan Dinas	303.468.774	378.062.283
Beban Kendaraan Dinas	179.951.083	59.674.372
Jumlah Beban Operasional	823.144.129	788.073.825

Rincian jumlah beban sumber daya manusia adalah :

	2014	2013
Gaji dan Tunjangan Komisaris	764.508.010	675.000.000
Gaji dan Tunjangan Direksi	2.347.348.898	2.043.752.677
Gaji dan Tunjangan Karyawan	2.560.360.428	1.634.067.670
Beban Imbal Pasca Kerja	22.152.960	60.952.551
Beban Pengembangan SDM	120.247.825	12.274.567
Jumlah Beban Sumber Daya Manusia	5.814.618.121	4.426.047.465

Rincian jumlah beban administrasi kantor dan umum adalah :

	2014	2013
Beban Administrasi	680.530.870	299.912.243
Beban Sewa	71.600.000	23.800.000
Beban Komunikasi & Energi	102.776.889	70.950.497
Beban Penyusutan & Amortisasi Aset	309.747.366	288.260.231
Beban Pemeliharaan & Asuransi Aset	55.750.851	98.780.440
Beban Pajak	1.828.759	-
Beban Umum	192.437.412	249.774.036
Jumlah Beban Administrasi Kantor dan Umum	1.414.672.147	1.031.477.447

22. PENDAPATAN NON OPERASI

Pendapatan non operasional per 31 Desember 2014 dan 2013 terdiri dari :

	2014	2013
Pendapatan Jasa Giro Bruto	41.873.212	37.330.273
Pendapatan Subrogasi	29.541.282	-
Pendapatan Lainnya	2.080.736	-
Jumlah Pendapatan Non Operasi	73.495.230	37.330.273
Biaya Non Operasional		
Biaya Lain-lain	(5.907.183)	-
Jumlah Biaya Non Operasi	(5.907.183)	-
Jumlah Pendapatan Non Operasi	67.588.047	37.330.273

23. TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usahanya, perusahaan melakukan transaksi tertentu dengan pihak berelasi, dimana manajemen berpendapat transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga, yang meliputi:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Sifat Dari Transaksi
Bank BJB	Pengendalian bersama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Giro, deposito dan penampungan sementara
Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Pemegang saham	Penyertaan Saham
YKP Bank BJB	Pemegang saham	Penyertaan Saham

24. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Unit Usaha Syariah PT JAMKRIDA JABAR (Perusahaan) dibentuk oleh Keputusan Direksi PT Jamkrida Jabar Nomor: Kep-0008/DIR/JJ/III/2014 tanggal 24 Maret 2014 tentang Panitia Pembentukan Unit Syariah dan telah mendapat izin dari OJK (Otorisasi Jasa Keuangan) dengan Nomor: SR-5/NB.223/2015 tanggal 10 Februari 2015 tentang Pemberian Izin Pembentukan Unit Usaha Syariah PT Jamkrida Jabar.